



**RUMUSAN HASIL
FORUM KEPALA BAPPEDA SE-KTI V
MAKASSAR, 8 MARET 2010**

Tema:

“Sinergi Pusat Daerah dan Antar Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan KTI”

1. Sinergi Pusat – Daerah dan Antar Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan KTI

- Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI adalah sub jaringan F-KTI yang bertemu dua kali dalam setahun dan fokus pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
- Secara ekonomi, KTI berpotensi tumbuh berbasis SDA (pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya).
- Perlu merumuskan strategi pembangunan KTI dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki KTI mencakup SDM, SDA, dan capital agar returnnya dapat dinikmati kembali oleh KTI.
- Kewenangan yang lebih besar bagi daerah termasuk daerah-daerah di KTI di era desentralisasi terutama dalam perumusan dan pengambilan keputusan memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan yang dapat dibangun melalui sinergitas pembangunan antar-pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk kerjasama antar daerah (seperti kerjasama pengelolaan Teluk Tomini) dan kemitraan dengan swasta.
- Sinergi pembangunan direfleksikan dalam berbagai bentuk dan keterkaitan yang mencakup keterkaitan spasial (*spatial linkages*), keterkaitan sektoral (*sectoral linkages*) dan keterkaitan institusional (*institutional linkages*); dan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah, dan mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus.
- Hal ini mencakup sinergi dalam perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka kelembagaan dan aparatur, dan dalam kerangka pengembangan wilayah.
- Sinergi pembangunan juga mencakup sinergi dalam pengelolaan data dan informasi yang mencakup tiga aspek penting yakni ketersediaan data dan informasi yang akurat, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, dan dukungan infrastruktur berupa unit pengolahan data, program atau software untuk mendukung proses analisis, pemodelan, dan peramalan.
- Perlunya meminimalisir persaingan antar daerah untuk fokus pada kerjasama dan pengembangan wilayah bersama. Bappenas siap memfasilitasi komunikasi antar wilayah untuk mendukung perencanaan dan kerjasama pembangunan. Memperkuat gagasan pembentukan Asosiasi Bappeda se- Indonesia dengan terus mengoptimalkan fungsi dan perannya.
- Perlunya sinkronisasi buku 1, 2, 3 RPJMN 2010-2014. Yang menjadi prioritas perencanaan adalah di buku 3, dipadankan dengan prioritas nasional di buku 1, kemudian disesuaikan dengan program dan rencana kerja K/L di buku 2.
- Matriks sinkronisasi sudah disiapkan oleh Bappenas. Daerah (Bappeda) diharapkan bisa ikut mengisi matriks tersebut, untuk kepentingan perencanaan di daerah masing-masing. Bappenas siap menampung pemikiran dari daerah untuk sinkronisasi RPJMN dan RPJMD masing-masing daerah.

- Dalam kaitan dengan target-target pertumbuhan ekonomi di RPJMN, perlu dilihat bagaimana target-target serupa tertuang dalam RPJMD masing-masing daerah. Apakah sudah sesuai? Diharapkan Bappenas dapat memfasilitasi pelatihan bagi staff Bappeda mengenai kesesuaian RPJMD dengan target-target perekonomian.
- Kebijakan pembangunan sudah sangat baik. Kelemahannya justru di konsistensi penerapan oleh kementerian serta karakteristik daerah masih sering terabaikan. Misalnya yang dibutuhkan adalah gedung sekolah, di lapangan justru diberi sosialisasi.
- Perlu alokasi dana yang proporsional untuk potensi-potensi di KTI, sesuai dengan perencanaan di RPJMN.
- Perlu dukungan dari Bappenas untuk target pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Sudah ada kesepakatan dengan sesama Provinsi Kepulauan (ada 7 provinsi), bahwa rumput laut dijadikan komoditi unggulan, komitmen ini perlu untuk dijaga. Usulan spesifik mengenai rempah-rempah, sering terbentur di departemen teknis.
- Legislatif dan BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) juga perlu menyetujui rencana dan target-target pembangunan daerah. Ini bisa dilakukan saat sosialisasi RPJMN.
- Belum ada dasar untuk penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) - Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
- Smart practice dari NTB: Pra musrenbang untuk menyamakan visi para Bappeda kabupaten/kota.
- Pertemuan Forum Kepala Bappeda se-KTI V ini diharapkan dapat mendorong kerja yang lebih yang harmonis dan produktif antara Bappenas – Bappeda Provinsi dan Antar Bappeda Provinsi se-KTI dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 dan persiapan penyusunan RKP tahun 2011.
- Menyepakati untuk mereview kembali jadwal pelaksanaan Sosialisasi RPJMN 2010-2014 wilayah Sulawesi yang akan dilaksanakan di Manado dengan mempertimbangkan waktu dan keterlibatan seluruh Kepala Bappeda.

2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Data

- Analisis statistik perekonomian Indonesia:
 - Pertumbuhan quarterly mulai naik, setelah penurunan di periode krisis.
 - Mulai ada pergeseran ke sektor non-tradable sebagai kontributor pendapatan
 - KTI berkontribusi hanya sekitar 7-8 persen.
 - Pertumbuhan terbesar di KTI justru sektor non-tradable (jasa), padahal sumber daya terbesar adalah sumber daya alam dan pertanian.
 - Pertumbuhan capital formation (tidak termasuk tanah dan working capital) di KTI tergolong tinggi.
- Analisis input output:
 - Mesti ada tabel input output provinsi/daerah.
 - Perlunya mempertimbangkan penyusunan interregional input-output untuk melihat keterkaitan antara wilayah-wilayah di dalam KTI dalam mengembangkan pertumbuhan wilayah. Data yang ada masih bersifat parsial, misalnya Teluk Tomini. Demikian juga untuk mewujudkan ide Sulawesi sebagai lumbung pangan, juga terbentur dengan data yang masih parsial.
 - Perlu ada kuantifikasi ilmu-ilmu sosial untuk mendukung perhitungan ekonomi dalam tabel input-output tadi.

- Selain tabel input-output, ada juga IRIO-SAM (Inter-Regional Input Output - Social Accounting Matrix). Dari situ bisa lebih jauh dilihat dampak-dampak dari setiap kegiatan ekonomi terhadap berbagai sektor lain.
- Perlu ada pihak ketiga yang mengkoordinir pengumpulan data dan penyediaan data/informasi untuk KTI.
- Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah (IPD), kinerja propinsi-propinsi di KTI relatif lebih rendah dibandingkan dengan di KBI. Kontribusi KTI terhadap ekonomi (PDB) nasional masih rendah (7.98%) dengan PDRB per kapita yang masih lebih rendah dibandingkan dengan KBI, didominasi sektor-sektor non-tradeable (services).
- Mempertimbangkan penggunaan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) dalam mengukur kemajuan daerah sebagai suatu konsep ukuran pembangunan yang mencakup keberdayaan pemerintah; perkembangan wilayah; dan pemberdayaan masyarakat.
- Index Pembangunan Daerah merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan 7 variabel berikut:
 - PDRB per kapita
 - % penduduk miskin
 - IMR (*Infant Mortality Rate*) – Angka Kematian Bayi
 - *Unemployment rate* – angka pengangguran
 - Angka Harapan Hidup
 - Angka Melek Huruf
 - Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan)
- Selama ini BPS dan Bappeda sudah bekerjasama dalam hal *historical data*. Ke depannya perlu dipikirkan kerja sama untuk analisis input output, analisis data yang lebih sesuai untuk perencanaan pembangunan, dan Indeks Pembangunan Daerah untuk instrumen pendukung perencanaan pembangunan.
- Perlunya analisa data lebih jauh dari BPS. Tidak sekedar melihat angka pertumbuhan saja, tapi juga lebih melihat dampak dari setiap pertumbuhan atau penurunan. Perlu ada kerjasama berdasarkan studi statistik, terutama dengan provinsi-provinsi tetangga.
- Unicef di Sulawesi Barat mengadakan program MDGs monitoring. Mengenai IPM, ada kegiatan-kegiatan yang *low cost* tapi *high impact* untuk meningkatkan indikator-indikator IPM. Jadi tidak hanya fokus ke pembangunan ekonomi. Seperti Kampanye ASI-Eksklusif, pendekatan kemitraan bidan dan dukun.

Rekomendasi

- Mendorong kerjasama yang lebih kuat antara BAPPEDA, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Jaringan Peneliti KTI (JiKTI). Diharapkan agar BPS, tupoksinya lebih banyak pada penyediaan data regional. JiKTI berperan dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah yang berperspektif regional. Data-data kemudian akan digunakan oleh Bappeda untuk perencanaan berbasis pengetahuan dan evaluasi pembangunan.
- Perlu untuk mendorong BPS Pusat membentuk Desk Regional yang akan bertanggung jawab terhadap diseminasi statistik regional sekaligus berfungsi mengkoordinasikan BPS Daerah dalam rangka pendekatan/perspektif wilayah/regional karena pendekatan RPJMN 2010-14 buku III adalah pendekatan wilayah/regional. Hal ini penting karena data pendukung per pulau/wilayah hampir tidak ada. Ini dimaksudkan agar koordinasi antar pulau akan semakin baik.
- Segera menindaklanjuti pelaksanaan PP. 19/2010 tentang penguatan peran Gubernur untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi.



- Mengoptimalkan penyusunan Rencana Tata Ruang sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berdimensi spasial.
- Melibatkan partisipasi stakeholder lain pada forum-forum yang akan datang seperti unsur Kadin, dan lain-lain.
- Menginisiasi penyusunan interregional input-output untuk melihat keterkaitan antara wilayah-wilayah di dalam KTI dalam mengembangkan pertumbuhan wilayah.
- Mengusahakan kerjasama regional di Kawasan Timur Indonesia untuk bidang atau sektor tertentu. Ini juga untuk menghilangkan paradigma persaingan antar provinsi di KTI dan mengedepankan kerjasama kawasan. Perlu ada kajian mengenai peluang interkoneksi ini, yang sebisa mungkin juga didukung oleh BPS.

--+++++--+++++--

List Peserta Forum Kepala Bappeda se KTI V

No.	Nama	Institusi
Bappeda Provinsi		
1	John J. Boekorsjom	Bappeda Papua
2	Ir. Totok Mei Untarto, MSc	Bappeda Papua Barat
3	Dr. Rosyadi Sayuti, MSc	Kepala Bappeda Nusa Tenggara Barat
4	Ir. Wayan Darmawa, MP	Kepala Bappeda Nusa Tenggara Timur
5	Dr. Hiron Fernandez	Sekretaris Bappeda Nusa Tenggara Timur
6	Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong, M,Ed	Kepala Bappeda Sulawesi Utara
7	Suparman	Bappeda Sulawesi Barat
8	Ir. Tan Malaka Guntur, MSi	Kepala Bappeda Sulawesi Selatan
9	Prof. DR. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS	Kepala Bappeda Gorontalo/Ketua Pokja Forum KTI
10	Ir. M.Z. Sangadji, M.Si	Kepala Bappeda Maluku
11	A. Ambaru	Bappeda Sulawesi Selatan
12	Juliana Makkarumpa	Bappeda Sulawesi Selatan
13	Aryanto Husain, MSi	Bappeda Gorontalo
14	Dr. Rakib Sahubawa, SPi, MSi	Bappeda Maluku
BPS Provinsi		
15	Ir. Tanda Sirait, MM	Kepala BPS Papua Barat
16	H. Soegarenda, MA	Kepala BPS Nusa Tenggara Barat
17	Ir. Poltak Sutrisno Siahaan	Kepala BPS Nusa Tenggara Timur
18	Drs. Jasabangun, Msi	Kepala BPS Sulawesi Utara
19	Drs. Rajali Ritonga	Kepala BPS Sulawesi Tengah
20	Ir. Bambang Suprijanto	Kepala BPS Sulawesi Selatan
21	Ir. Wien Kusdiatmono, MM	Kepala BPS Gorontalo
22	Nur Syam	Kepala BPS Sulawesi Barat
Narasumber		
23	Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA	Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah – BAPPENAS
24	Dr. Slamet Sutomo, S.E	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik-BPS RI
25	Dr. Ir. Dadang Sumantri Mochtar	Direktur Perkotaan - Ditjend Bina Bangda – DEP DAGRI
Peserta		
26	Dr. Ir. Arifin Rudiyanto ,M.Sc, Ph.D	Direktur Pengembangan Wilayah - BAPPENAS
27	Dr. Ir. Himawan Hariyoga	Direktur Otonomi Daerah-BAPPENAS
28	Heru Tjahyono	Ditjend Bina Bangda – DEP DAGRI

29	Dr. Suhariyanto	Kepala Sub Direktorat Analisis Statistik - BPS RI
30	Dr. Agussalim, MA	Focal Point JiKTI / PSKMP UNHAS
31	Abdul Madjid Sallatu, MA	Pokja Forum KTI Sulsel / PSKMP UNHAS
32	Dr. Ir. B. Elim Somba, MSi	SekjeBadan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi
Donor		
33	Matsui Kazuhisa	JICA BAPPEDA Sulsel
34	Ida Gosal	JICA MFO
35	Abdul KS. Nasser	Sulawesi Water and Sanitation Hygiene - CARE (SWASH)
36	Purwanta Iskandar	UNICEF
37	Wuriyanto	UNICEF